

BAB III

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Sesuai dengan topik skripsi “*Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Electronic Banking dalam Perspektif Hukum Perbankan*” dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah pengguna layanan *electronic banking* baik berupa perlindungan hukum secara *implisit* maupun perlindungan hukum secara *eksplisit* yang dapat dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada antara lain dari UU Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan KUH Perdata.

Perlindungan hukum tersebut dapat di dapatkan nasabah karena adanya suatu hubungan *kontraktual* ataupun hubungan *non kontraktual* antar pihak bank dengan nasabah yang menjadi dasar seorang nasabah dapat menuntut pihak bank apabila terjadi suatu kesalahan yang di lakukan pihak bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah pengguna *electronic banking* tetapi yang harus digaris bawahi hal ini dapat dilakukan nasabah apabila pihak bank yang menyebabkan kerugian bagi dirinya. Tetapi jika kerugian di sebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketigalah yang harus bertanggung jawab dan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila nasabah yang melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Perlindungan hukum ini dirasa menjadi suatu hal yang sangat *urgen* mengingat banyaknya ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah ancaman tersebut antara lain *man in the middle attack* dan *Trojan horses*. Kedua jenis kejahatan

tersebut mampu menyerang sistem *electronic banking* yang mengakibatkan nasabah secara tidak sadar membelokkan sejumlah uangnya ke rekening pelaku kejahatan.

Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila pihak bank secara berlomba-lomba bersaing untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya guna *meminimalkan* terjadinya kerugian dan hilangnya kepercayaan dari nasabah kepada pihak bank. Tetapi tidak dapat dipungkiri meskipun pihak bank sudah berusaha sebaik mungkin untuk *meminimalkan* terjadinya kesalahan yang merugikan nasabah, pada kenyataannya masih banyak sekali tindak kejahatan maupun pelanggaran di bidang perbankan yang tidak dapat di selesaikan.

Padahal jika di lihat ada banyak peraturan yang melindungi nasabah pengguna *electronic banking* seperti yang telah dipaparkan di atas, hal ini dirasa sangat menghawatirkan karena perlindungan hukum yang dirasa penting dan harus tetapi peraturan yang ada tidak mencakup semua perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *electronic banking*. Jadi para penegak hukum masih harus melakukan penafsiran mengenai penegakan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *electronic banking*.

Selain itu juga peraturan yang ada dirasa sudah sangat usang dengan perkembangan jaman di era globalisasi ini, sehingga seharusnya peraturan tersebut ditinjau ulang dengan menyesuaikan perkembangan jaman. Sehingga terciptalah suatu aturan yang jelas dan pasti mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *electronic banking*.

1.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *electronic banking*, pemerintah dan instansi yang terkait dapat melakukan langkah

prefentif dan *represif*. Berikut akan dijelaskan langkah *prefentif* yang dapat di tempuh, yang antara lain;

1. Bank Indonesia dapat melakukan penyuluhan mengenai sistem pengamanan suatu produk di bank serta penyuluhan mengenai hak dan kewajiban yang di miliki nasabah kepada seluruh bank yang ada, yang selanjutnya pihak bank dapat memberikan informasi tersebut kepada nasabah langsung pada saat nasabah ingin memiliki suatu produk yang di tawarkan oleh bank yang bersangkutan.
2. Bank Indonesia dapat menerapkan suatu sistem pengamanan yang wajib dimiliki oleh tiap bank dan jika dimungkinkan Bank Indonesia dapat menyewa seorang ahli teknologi guna untuk meningkatkan sistem pengamanan ditiap bank yang pendapatan ahli teknologi tersebut dapat dianggarkan dari persentase keuntungan dari tiap bank.
3. Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas khususnya Bank Indonesia harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank pemerintah maupun bank swasta. Hanya saja perlu di perhatikan di sini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang di awasinya itu, sebab pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas dari batas-batas ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.

Sedangkan saran guna perlindungan hukum secara *represif* yang dapat di dapakan nasabah adalah dengan cara, yang antara lain;

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi terhadap peraturan yang ada khususnya peraturan mengenai UU Perbankan, UU BI dan UU OJK yang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan banyaknya kasus kejahatan

ataupun pelanggan di bidang perbankan. Sehingga diperlukan banyak perbaikan dalam ketiga UU tersebut karena mengingat UU tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa perbankan maka menjadi hal yang sangat penting apabila ketiga UU tersebut segera dilakukan peninjauan ulang.

2. Selain revisi terhadap UU Perbankan, revisi juga diperlukan untuk UU Perlindungan konsumen, KUHP dan KUHPerdara. Karena ketiga peraturan tersebut dirasa juga sudah sangat usang. UU Perlindungan Konsumen dibuat tahun 1999 sedangkan sekarang sudah tahun 2016 jadi UU Perlindungan Konsumen sudah 17 tahun menanugi hak-hak konsumen tanpa adanya perbaikan. Padahal tiap hari konsumen selalu mempunyai masalah yang lebih *kompleks* yang harus di selesaikan, sedangkan UU Perlindungan Konsumen tidak berubah atau dapat dikatakan sama selama 17 tahun terakhir ini. Hal yang sama terjadi pula dalam KUHP dan KUHPerdara kedua peraturan tersebut di atas sudah sangat tidak *relevan* dengan perkembangan yang ada, hal ini dikarenakan KUHP dan KUHPerdara merupakan hukum peninggalan belanda yang sudah diterapkan menjadi hukum nasional Indonesia dengan sangat lama. sehingga banyak aturan dalam KUHP ataupun KUHPerdara yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kejahatan maupun pelanggaran yang ada. Maka dari itu penulis menghimbau kepada pemerintah untuk segera mungkin melakukan revisi terhadap beberapa peraturan di atas yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada.
3. Walaupun jika pemerintah belum membuat revisi mengenai peraturan yang terkait perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *electronic banking*. Pemerintah dapat melaksanakan peraturan di bidang perbankan yang ada. Hal tersebut dirasa merupakan Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih

ketat oleh pihak otoritas monetary. Khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat di jamin *law enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus di tegakan secara obyektif.

4. Manakala *government regulation* belum mengatur tentang *electronic banking*, akan lebih menguntungkan bila aturan tentang perlindungan nasabah pengguna *electronic banking* dalam *self regulation* atau *internal regulation*.

